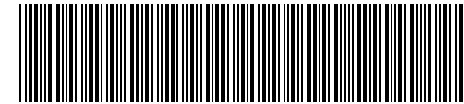




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA-135.11-0/2025**



DS:6180-1141-9105-0552

**A. DASAR HUKUM :**

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :**

- |                                |   |                                       |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 135 KEMENTERIAN HUKUM                 |
| 2. UNIT ORGANISASI             | : | 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. PAGU                        | : | Rp.143.549.616.000                    |
- (SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :**

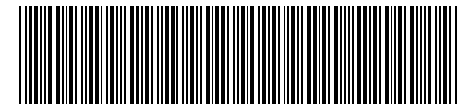
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA  
NIP.196612301991021001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 135	KEMENTERIAN HUKUM
2. UNIT ORGANISASI	: 11	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. PAGU	: Rp.143.549.616.000	

(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

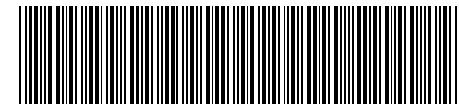
**B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :**

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	12.894.989
		135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	86.535.739
		135.11.WA	Program Dukungan Manajemen	44.118.888
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI	
		02	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	
3. FUNGSI	:	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	143.549.616
SUB FUNGSI	:	0303	PEMBINAAN HUKUM	143.549.616
4. PRIORITAS NASIONAL	:	01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	59.056.130
NON PRIORITAS NASIONAL	:			84.493.486



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

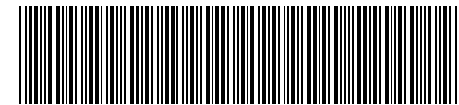
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi		12.894.989
SP02	Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan		
IKP01	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang disampaikan kepada K/L	20 Persen	
7131	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional		4.890.362
01.01	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dihasilkan terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang direncanakan	80 Persen	
7132	Perencanaan Hukum Nasional		3.497.998
01.01	Persentase jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah yang masuk dalam prolegnas prioritas tahunan	10 Persen	
01.02	Persentase jumlah RPP dan RPerpres dalam Progsun PP/Perpres yg sesuai dg delegasi PUU, hasil analisis dan evaluasi, dan/atau prioritas pembangunan nasional dg memperhatikan penyederhanaan regulasi terhadap total RPP dan RPerpres dalam Progsun PP/Perpres	70 Persen	
7133	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		4.506.629
01.01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	33 Dokumen	
01.02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	33 Dokumen	
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		86.535.739
SP05	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum		
IKP01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum	3,08 Indeks	
7134	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional		4.915.265
01.01	Persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia	10 persentase	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



DS:6180-1141-9105-0552

**I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
7135	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum		7.442.285
01.01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 persentase	
01.02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 persentase	
02.01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap seluruh usulan Kantor Wilayah	70 Persentase	
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		74.178.189
01.01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 Persentase	
02.01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 Persentase	
02.02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 Persentase	
03.01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 Persentase	
135.11.WA	Program Dukungan Manajemen		44.118.888
SP04	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum		
7137	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		44.118.888
01.01	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BPHN	100 Persen	
01.02	Indeks kepuasan unit kerja lingkup BPHN terhadap layanan kesekretariatan	3,1 Indeks	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001



**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

- 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM
- 2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi		0	12.894.989	0	0	12.894.989	3.968.631
	01	DKI JAKARTA		0	8.538.995	0	0	8.538.995	2.467.427
	693092	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	KD	0	150.635	0	0	150.635	30.541
	A00	RM		0	150.635	0	0	150.635	30.541
	693118	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	KP	0	8.388.360	0	0	8.388.360	2.436.886
	A00	RM		0	8.388.360	0	0	8.388.360	2.436.886
	02	JAWA BARAT		0	144.059	0	0	144.059	49.705
	693093	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT	KD	0	144.059	0	0	144.059	49.705
	A00	RM		0	144.059	0	0	144.059	49.705
	03	JAWA TENGAH		0	157.549	0	0	157.549	56.829
	693094	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	KD	0	157.549	0	0	157.549	56.829
	A00	RM		0	157.549	0	0	157.549	56.829
	04	DI YOGYAKARTA		0	148.890	0	0	148.890	44.213
	693113	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA	KD	0	148.890	0	0	148.890	44.213
	A00	RM		0	148.890	0	0	148.890	44.213
	05	JAWA TIMUR		0	146.941	0	0	146.941	49.465
	693095	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	KD	0	146.941	0	0	146.941	49.465
	A00	RM		0	146.941	0	0	146.941	49.465

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

- 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM
- 2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	06	ACEH		0	141.276	0	0	141.276	59.257
	693098	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH	KD	0	141.276	0	0	141.276	59.257
	A00	RM		0	141.276	0	0	141.276	59.257
	07	SUMATERA UTARA		0	141.516	0	0	141.516	42.425
	693096	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	KD	0	141.516	0	0	141.516	42.425
	A00	RM		0	141.516	0	0	141.516	42.425
	08	SUMATERA BARAT		0	139.438	0	0	139.438	24.881
	693099	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	KD	0	139.438	0	0	139.438	24.881
	A00	RM		0	139.438	0	0	139.438	24.881
	09	RIAU		0	147.589	0	0	147.589	57.034
	693100	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU	KD	0	147.589	0	0	147.589	57.034
	A00	RM		0	147.589	0	0	147.589	57.034
	10	JAMBI		0	132.773	0	0	132.773	48.435
	693111	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAMBI	KD	0	132.773	0	0	132.773	48.435
	A00	RM		0	132.773	0	0	132.773	48.435
	11	SUMATERA SELATAN		0	128.253	0	0	128.253	48.360
	693101	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN	KD	0	128.253	0	0	128.253	48.360
	A00	RM		0	128.253	0	0	128.253	48.360
	12	LAMPUNG		0	134.288	0	0	134.288	50.450

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025  
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**



**A. IDENTITAS UNIT :**

- 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM
- 2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

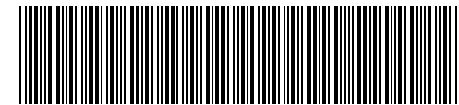
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	693102	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG	KD	0	134.288	0	0	134.288	50.450
	A00	RM		0	134.288	0	0	134.288	50.450
	13	KALIMANTAN BARAT		0	139.803	0	0	139.803	30.490
	693103	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT	KD	0	139.803	0	0	139.803	30.490
	A00	RM		0	139.803	0	0	139.803	30.490
	14	KALIMANTAN TENGAH		0	129.381	0	0	129.381	52.657
	693114	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TENGAH	KD	0	129.381	0	0	129.381	52.657
	A00	RM		0	129.381	0	0	129.381	52.657
	15	KALIMANTAN SELATAN		0	139.308	0	0	139.308	46.204
	693104	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN	KD	0	139.308	0	0	139.308	46.204
	A00	RM		0	139.308	0	0	139.308	46.204
	16	KALIMANTAN TIMUR		0	133.642	0	0	133.642	56.030
	693105	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	KD	0	133.642	0	0	133.642	56.030
	A00	RM		0	133.642	0	0	133.642	56.030
	17	SULAWESI UTARA		0	116.094	0	0	116.094	35.855
	693106	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI UTARA	KD	0	116.094	0	0	116.094	35.855
	A00	RM		0	116.094	0	0	116.094	35.855
	18	SULAWESI TENGAH		0	141.851	0	0	141.851	53.055
	693116	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH	KD	0	141.851	0	0	141.851	53.055

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00	RM		0	141.851	0	0	141.851	53.055
	19	SULAWESI SELATAN		0	128.257	0	0	128.257	41.548
	693097	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN	KD	0	128.257	0	0	128.257	41.548
	A00	RM		0	128.257	0	0	128.257	41.548
	20	SULAWESI TENGGARA		0	141.326	0	0	141.326	40.570
	693115	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA	KD	0	141.326	0	0	141.326	40.570
	A00	RM		0	141.326	0	0	141.326	40.570
	21	MALUKU		0	116.221	0	0	116.221	41.060
	693109	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU	KD	0	116.221	0	0	116.221	41.060
	A00	RM		0	116.221	0	0	116.221	41.060
	22	BALI		0	136.068	0	0	136.068	62.500
	693107	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI	KD	0	136.068	0	0	136.068	62.500
	A00	RM		0	136.068	0	0	136.068	62.500
	23	NUSA TENGGARA BARAT		0	140.223	0	0	140.223	44.670
	693117	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT	KD	0	140.223	0	0	140.223	44.670
	A00	RM		0	140.223	0	0	140.223	44.670
	24	NUSA TENGGARA TIMUR		0	145.632	0	0	145.632	54.570
	693108	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR	KD	0	145.632	0	0	145.632	54.570
	A00	RM		0	145.632	0	0	145.632	54.570

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.





**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



DS:6180-1141-9105-0552

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	25	PAPUA		0	128.825	0	0	128.825	36.290
	693110	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	KD	0	128.825	0	0	128.825	36.290
	A00	RM		0	128.825	0	0	128.825	36.290
	26	BENGKULU		0	133.859	0	0	133.859	42.560
	693112	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU	KD	0	133.859	0	0	133.859	42.560
	A00	RM		0	133.859	0	0	133.859	42.560
	28	MALUKU UTARA		0	125.777	0	0	125.777	42.129
	693122	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA	KD	0	125.777	0	0	125.777	42.129
	A00	RM		0	125.777	0	0	125.777	42.129
	29	BANTEN		0	138.004	0	0	138.004	35.160
	693119	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN	KD	0	138.004	0	0	138.004	35.160
	A00	RM		0	138.004	0	0	138.004	35.160
	30	KEP. BANGKA BELITUNG		0	136.916	0	0	136.916	56.240
	693120	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KD	0	136.916	0	0	136.916	56.240
	A00	RM		0	136.916	0	0	136.916	56.240
	31	GORONTALO		0	120.306	0	0	120.306	38.731
	693121	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM GORONTALO	KD	0	120.306	0	0	120.306	38.731
	A00	RM		0	120.306	0	0	120.306	38.731
	32	KEPULAUAN RIAU		0	133.835	0	0	133.835	54.522

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



DS:6180-1141-9105-0552

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
 2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
 (SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	693124	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU	KD	0	133.835	0	0	133.835	54.522
	A00	RM		0	133.835	0	0	133.835	54.522
	33	PAPUA BARAT		0	127.589	0	0	127.589	53.555
	693123	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	KD	0	127.589	0	0	127.589	53.555
	A00	RM		0	127.589	0	0	127.589	53.555
	34	SULAWESI BARAT		0	140.505	0	0	140.505	51.754
	693125	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT	KD	0	140.505	0	0	140.505	51.754
	A00	RM		0	140.505	0	0	140.505	51.754
	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		0	86.355.518	180.221	0	86.535.739	8.923.032
	01	DKI JAKARTA		0	16.877.665	50.000	0	16.927.665	3.768.043
	693092	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	KD	0	4.565.115	5.000	0	4.570.115	117.192
	A00	RM		0	4.565.115	5.000	0	4.570.115	117.192
	693118	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	KP	0	12.312.550	45.000	0	12.357.550	3.650.851
	A00	RM		0	12.312.550	45.000	0	12.357.550	3.650.851
	02	JAWA BARAT		0	5.447.398	8.000	0	5.455.398	174.058
	693093	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT	KD	0	5.447.398	8.000	0	5.455.398	174.058
	A00	RM		0	5.447.398	8.000	0	5.455.398	174.058
	03	JAWA TENGAH		0	6.087.619	0	0	6.087.619	153.603

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**  
**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**



**A. IDENTITAS UNIT :**

- 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM
- 2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	693094	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH	KD	0	6.087.619	0	0	6.087.619	153.603
	A00	RM		0	6.087.619	0	0	6.087.619	153.603
	04	DI YOGYAKARTA		0	2.585.153	0	0	2.585.153	154.170
	693113	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM D.I YOGYAKARTA	KD	0	2.585.153	0	0	2.585.153	154.170
	A00	RM		0	2.585.153	0	0	2.585.153	154.170
	05	JAWA TIMUR		0	7.158.113	0	0	7.158.113	167.082
	693095	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	KD	0	7.158.113	0	0	7.158.113	167.082
	A00	RM		0	7.158.113	0	0	7.158.113	167.082
	06	ACEH		0	2.776.167	0	0	2.776.167	181.948
	693098	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH	KD	0	2.776.167	0	0	2.776.167	181.948
	A00	RM		0	2.776.167	0	0	2.776.167	181.948
	07	SUMATERA UTARA		0	4.049.777	15.000	0	4.064.777	147.323
	693096	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA	KD	0	4.049.777	15.000	0	4.064.777	147.323
	A00	RM		0	4.049.777	15.000	0	4.064.777	147.323
	08	SUMATERA BARAT		0	1.521.118	4.000	0	1.525.118	168.937
	693099	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT	KD	0	1.521.118	4.000	0	1.525.118	168.937
	A00	RM		0	1.521.118	4.000	0	1.525.118	168.937
	09	RIAU		0	1.783.551	0	0	1.783.551	176.502
	693100	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU	KD	0	1.783.551	0	0	1.783.551	176.502

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**  
**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**



**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00	RM		0	1.783.551	0	0	1.783.551	176.502
	10	JAMBI		0	2.051.003	12.000	0	2.063.003	103.680
	693111	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAMBI	KD	0	2.051.003	12.000	0	2.063.003	103.680
	A00	RM		0	2.051.003	12.000	0	2.063.003	103.680
	11	SUMATERA SELATAN		0	1.635.472	0	0	1.635.472	135.572
	693101	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN	KD	0	1.635.472	0	0	1.635.472	135.572
	A00	RM		0	1.635.472	0	0	1.635.472	135.572
	12	LAMPUNG		0	2.287.124	10.000	0	2.297.124	137.821
	693102	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM LAMPUNG	KD	0	2.287.124	10.000	0	2.297.124	137.821
	A00	RM		0	2.287.124	10.000	0	2.297.124	137.821
	13	KALIMANTAN BARAT		0	919.231	0	0	919.231	170.338
	693103	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT	KD	0	919.231	0	0	919.231	170.338
	A00	RM		0	919.231	0	0	919.231	170.338
	14	KALIMANTAN TENGAH		0	1.192.976	3.120	0	1.196.096	141.928
	693114	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TENGAH	KD	0	1.192.976	3.120	0	1.196.096	141.928
	A00	RM		0	1.192.976	3.120	0	1.196.096	141.928
	15	KALIMANTAN SELATAN		0	1.121.986	15.000	0	1.136.986	172.873
	693104	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN	KD	0	1.121.986	15.000	0	1.136.986	172.873
	A00	RM		0	1.121.986	15.000	0	1.136.986	172.873

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	16	KALIMANTAN TIMUR		0	2.151.578	0	0	2.151.578	163.769
	693105	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	KD	0	2.151.578	0	0	2.151.578	163.769
	A00	RM		0	2.151.578	0	0	2.151.578	163.769
	17	SULAWESI UTARA		0	1.250.432	3.000	0	1.253.432	165.333
	693106	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI UTARA	KD	0	1.250.432	3.000	0	1.253.432	165.333
	A00	RM		0	1.250.432	3.000	0	1.253.432	165.333
	18	SULAWESI TENGAH		0	1.936.960	0	0	1.936.960	158.275
	693116	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH	KD	0	1.936.960	0	0	1.936.960	158.275
	A00	RM		0	1.936.960	0	0	1.936.960	158.275
	19	SULAWESI SELATAN		0	3.543.356	0	0	3.543.356	191.217
	693097	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN	KD	0	3.543.356	0	0	3.543.356	191.217
	A00	RM		0	3.543.356	0	0	3.543.356	191.217
	20	SULAWESI TENGGARA		0	1.997.139	9.617	0	2.006.756	172.270
	693115	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA	KD	0	1.997.139	9.617	0	2.006.756	172.270
	A00	RM		0	1.997.139	9.617	0	2.006.756	172.270
	21	MALUKU		0	1.028.498	1.000	0	1.029.498	137.915
	693109	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU	KD	0	1.028.498	1.000	0	1.029.498	137.915
	A00	RM		0	1.028.498	1.000	0	1.029.498	137.915
	22	BALI		0	1.103.422	0	0	1.103.422	154.516

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



DS:6180-1141-9105-0552

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM
2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	693107	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI	KD	0	1.103.422	0	0	1.103.422	154.516
	A00	RM		0	1.103.422	0	0	1.103.422	154.516
	23	NUSA TENGGARA BARAT		0	2.257.581	0	0	2.257.581	179.952
	693117	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT	KD	0	2.257.581	0	0	2.257.581	179.952
	A00	RM		0	2.257.581	0	0	2.257.581	179.952
	24	NUSA TENGGARA TIMUR		0	1.825.098	15.000	0	1.840.098	176.882
	693108	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR	KD	0	1.825.098	15.000	0	1.840.098	176.882
	A00	RM		0	1.825.098	15.000	0	1.840.098	176.882
	25	PAPUA		0	899.591	0	0	899.591	147.612
	693110	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	KD	0	899.591	0	0	899.591	147.612
	A00	RM		0	899.591	0	0	899.591	147.612
	26	BENGGKULU		0	1.714.131	13.000	0	1.727.131	167.234
	693112	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGGKULU	KD	0	1.714.131	13.000	0	1.727.131	167.234
	A00	RM		0	1.714.131	13.000	0	1.727.131	167.234
	28	MALUKU UTARA		0	1.393.471	0	0	1.393.471	199.070
	693122	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA	KD	0	1.393.471	0	0	1.393.471	199.070
	A00	RM		0	1.393.471	0	0	1.393.471	199.070
	29	BANTEN		0	2.385.284	1.984	0	2.387.268	169.520
	693119	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN	KD	0	2.385.284	1.984	0	2.387.268	169.520

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

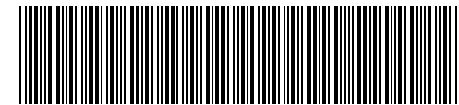
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00	RM		0	2.385.284	1.984	0	2.387.268	169.520
	30	KEP. BANGKA BELITUNG		0	1.136.055	5.000	0	1.141.055	125.434
	693120	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KD	0	1.136.055	5.000	0	1.141.055	125.434
	A00	RM		0	1.136.055	5.000	0	1.141.055	125.434
	31	GORONTALO		0	1.276.347	4.500	0	1.280.847	133.326
	693121	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM GORONTALO	KD	0	1.276.347	4.500	0	1.280.847	133.326
	A00	RM		0	1.276.347	4.500	0	1.280.847	133.326
	32	KEPULAUAN RIAU		0	1.093.814	0	0	1.093.814	187.818
	693124	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU	KD	0	1.093.814	0	0	1.093.814	187.818
	A00	RM		0	1.093.814	0	0	1.093.814	187.818
	33	PAPUA BARAT		0	755.106	10.000	0	765.106	128.750
	693123	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	KD	0	755.106	10.000	0	765.106	128.750
	A00	RM		0	755.106	10.000	0	765.106	128.750
	34	SULAWESI BARAT		0	1.113.302	0	0	1.113.302	210.261
	693125	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT	KD	0	1.113.302	0	0	1.113.302	210.261
	A00	RM		0	1.113.302	0	0	1.113.302	210.261
	135.11.WA	Program Dukungan Manajemen		17.552.977	18.166.160	8.399.751	0	44.118.888	1.916.225
	01	DKI JAKARTA		17.552.977	18.166.160	8.399.751	0	44.118.888	1.916.225
	693118	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	KP	17.552.977	18.166.160	8.399.751	0	44.118.888	1.916.225

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



DS:6180-1141-9105-0552

**II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

**A. IDENTITAS UNIT :**

- 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM
- 2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00	RM Target Pendapatan		17.552.977	18.166.160	8.399.751	0	44.118.888 20.000	1.916.225
		TOTAL		17.552.977	117.416.667	8.579.972	0	143.549.616	14.807.888
		RM PENDAPATAN		17.552.977	117.416.667	8.579.972	0	143.549.616 20.000	14.807.888

**KETENTUAN**

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

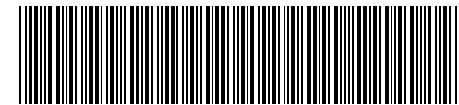


MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001





**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA-135.11-0/2025**



DS:6180-1141-9105-0552

**III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

**A. IDENTITAS UNIT :**

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 135 KEMENTERIAN HUKUM  
2. UNIT ORGANISASI : 135.11 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
3. PAGU : Rp.143.549.616.000  
(SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

**B. RENCANA PER PROGRAM**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi													
		RENCANA PENARIKAN DANA	12.894.989	295.195	640.843	1.339.319	1.847.178	1.248.974	1.598.571	1.567.271	1.062.243	1.401.629	927.183	509.752	456.829
2	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
		RENCANA PENARIKAN DANA	86.535.739	1.409.309	4.722.750	9.131.612	8.638.698	10.839.793	10.382.456	9.325.238	8.040.925	8.489.462	7.763.806	5.344.364	2.447.327
3	135.11.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	44.118.888	2.787.988	2.400.208	8.499.573	2.527.651	2.718.926	3.943.096	2.684.532	2.731.666	6.279.181	2.844.246	2.471.535	4.230.286
		PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	143.549.616	4.492.493	7.763.800	18.970.504	13.013.526	14.807.693	15.924.123	13.577.041	11.834.834	16.170.273	11.535.236	8.325.651	7.134.442
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



MIN USIHEN  
NIP. 197105011993031001